



Kota Yogyakarta Punya Lembaga Penanganan KDRT

YOGYA, TRIBUN - Kota Yogyakarta kini memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Adapun P2TP2A sendiri diproyeksikan sebagai lembaga penanganan kasus Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT) di Yogyakarta.

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat mengatakan, Pemkot Yogyakarta selama ini kerap

alami kesulitan dalam menampung korban KDRT. Menengok Pemkot saat itu belum memiliki P2TP2A.

"Sehingga ketika itu, kami

● ke halaman 14

Kota Yogyakarta Punya

● Sambungan Hal 13

mengandalkan Panti Sosial Karya Wanita Rekso Dyah Utami milik Pemda DIY untuk menangani kasus KDRT di Yogyakarta," ucap Octo, Kamis (22/9).

Dia pun berharap dengan adanya P2TP2A Kota Yogyakarta, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara maksimal, termasuk penanganan terhadap korban. Saat ini, pihaknya tengah menambah sejumlah fasilitas pendukung di P2TP2A.

"Supaya pusat pelayanan terpadu ini mempunyai fasilitas yang lengkap. Akan ada tempat untuk menampung korban KDRT jika memang dibutuhkan," imbuhnya.

Namun demikian, Octo menginginkan, masyarakat Kota Yogyakarta dapat memberi perlindungan satu sama lain, sehingga tak ada korban KDRT yang makin tertekan. Dengan begitu, jumlah kasus KDRT di Kota Yogyakarta ke depan dapat ditekan.

Selain memiliki P2TP2A, menurutnya, KPMP juga membentuk Satuan Tugas (Sat-

gas) Siap Gerak Atasi Kekerasan (Sigrak) di tiap kelurahan. Satgas Sigrak sendiri juga memiliki fungsi menangani KDRT dengan pendekatan masyarakat yang peduli sekitarnya.

"Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta cukup kompleks. Kita ingin, masyarakat bisa membantu menangani KDRT sejak dari lingkungan terdekat," ucap Octo.

Berdasar data KPMP Kota Yogyakarta, kasus KDRT yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2015 sebanyak 626 kasus. Sementara di tahun 2014, kasus KDRT sebanyak 642 kasus. Sedang di tahun 2013, kasus KDRT yang terjadi mencapai 691 kasus.

Ketahanan keluarga

Sementara itu, Kepala BPPM DIY, dr Ari-da Utami mengaku tengah membuat konsep program ketahanan keluarga. Nantinya, program ketahanan keluarga itu diharapkan mampu mengurangi angka kekerasan ke perempuan maupun ke anak, serta mengurangi angka perceraian keluarga.

"Nanti format program ketahanan keluarga ini bentuknya seperti intervensi yang disampaikan pada masyarakat," jelas mantan Kepala Dinas Kesehatan DIY ini. (mrf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005